BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan Ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi menjadi pengukur prestasi bagi kemajuan suatu perekonomian dari satu periode ke periode berikutnya. Secara berkelanjutan, kapasitas untuk menghasilkan barang dan jasa cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah dan peningkatan kualitas faktor-faktor produksi. Untuk memastikan kelangsungan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu dihindari agar pertumbuhan ekonomi tidak berjalan ditempat atau mengalami kemunduran. Pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus mengalami peningkatan dapat menggambarkan keberhasilan Pembangunan ekonomi di sutau wilayah. Sebaliknya, Pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus mengalami penurunan dapat menggambarkan bahwa Pembangunan ekonomi tidak mengalami kemajuan atau bahkan mengalami penurunan (Hellen, 2017).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi saling terkait dan dapat memberikan dorongan satu sama lain. Pembangunan ekonomi melibatkan serangkaian proses dan perubahan, dan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu elemen kunci di dalamnya. Adanya pertumbuhan ekonomi dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi yang lebih

luas, sebaliknya upaya pembangunan ekonomi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Proses pembangunan ekonomi melibatkan perubahan, baik dalam hal struktur ekonomi, lapangan kerja, teknologi, maupun kebijakan. Pertumbuhan ekonomi sering dianggap sebagai indikator perubahan positif dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis sebuah pembangunan nasional yang terjadi di suatu negara dan menjadi perhatian terutama pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian yang tercermin melalui peningkatan pendapatan nasional. Sukirno (2010) menjelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi bisa diartikan sebagai perkembangan aktivitas dalam sektor perekonomian yang mengakibatkan peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Todaro (2004) menjelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara dalam jangka panjang untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Peningkatan tersebut terjadi melalui kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis sebagai tanggapan terhadap berbagai tuntutan dari kondisi lingkungan yang ada. Pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari kinerja berbagai sektor yang memberikan gambaran bagaimana kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai dalam sektor ekonomi selama suatu periode tertentu. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diharapkan kesejahteraan Masyarakat akan menjadi lebih nyata.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

Menurut Sukirno (2013), konsep pertumbuhan dan pembangunan memiliki makna yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada proses peningkatan output per kapita secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, diharapkan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Sementara itu, pembangunan ekonomi merujuk pada upaya meningkatkan pendapatan per kapita dengan cara mengelola potensi ekonomi menjadi kenyataan melalui investasi modal, pemanfaatan teknologi, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan yang berkesinambungan menuju perbaikan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi memang sering diidentifikasi dengan peningkatan kapasitas produksi, yang mencerminkan kemampuan suatu negara atau provinsi untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dalam periode waktu tertentu.. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi pada tingkat provinsi dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang bagaimana perubahan kondisi perekonomian setiap wilayah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merancang kebijakan dan langkah-langkah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat berkontribusi secara langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor seperti pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan dapat ditingkatkan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan suatu daerah diukur melalui pertumbuhan ekonomi,

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

yang menjadi indikator utama pencapaian dan kesejahteraan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dianggap sebagai tanda kemajuan yang positif.

Pulau Sumatera merupakan Pulau terbesar ketiga di Indonesia memegang potensi sumber daya alam yang sangat besar. Dengan terdiri dari 10 provinsi, Pulau Sumatera dijadikan sebagai pulau dengan provinsi terbanyak di Indonesia. Keberagaman geografis dan sumber daya alam masing-masing provinsi di Pulau Sumatera memainkan peran penting dalam membentuk perbedaan kondisi perekonomian dan Tingkat kesejahteraan Masyarakat di masing-masing provinsi. Kondisi geografis dan keberagaman sumber daya alam di setiap daerah Pulau Sumatera menjadi faktor utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Perbedaan ini menciptakan variasi dalam potensi pembangunan dan kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya.

Berikut Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera yang terdiri dari 10 Provinsi yang disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Gambar 1.1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera

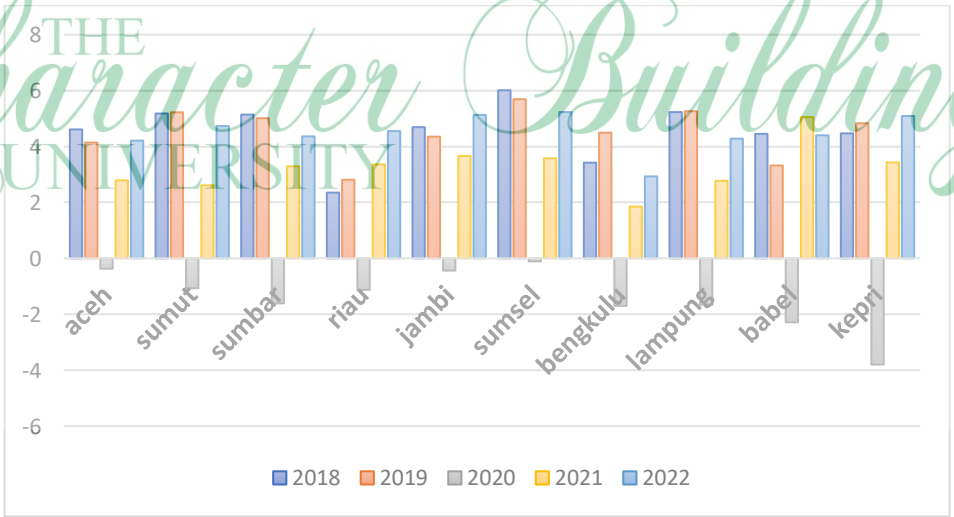

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

Dari grafik 1.1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di sepuluh (10) provinsi di Pulau Sumatera secara keseluruhan mengalami trend Fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada Provinsi Sumatera Selatan sebesar 6,01% pada tahun 2018 hal ini disebabkan karena adanya pelaksanaan Asian Games 2018 di Kota Palembang. Kegiatan ini telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi, industri pengolahan, dan penyediaan dana makanan dan minuman, yang berhubungan erat dengan banyaknya kunjungan wisatawan. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi terendah berada pada provinsi Kepulauan Riau sebesar -3,8% pada tahun 2020 hal ini disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19. Kondisi perekonomian pada tahun 2020 merupakan dampak dari terjadinya pandemi COVID-19 telah meluas ke berbagai aspek ekonomi, sehingga mengakibatkan kinerja perekonomian terganggu. Pandemi Covid-19 berdampak signifikan pada sektor perekonomian di Kepulauan Riau pada tahun 2020. Berbagai aktivitas ekonomi dan sosial di Kepulauan Riau terganggu, menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan harga minyak dunia dan penurunan permintaan bahan bakar akibat penurunan aktivitas transportasi selama masa pandemi. Kondisi perekonomian yang mengalami penurunan pada tahun 2020 tidak hanya dirasakan oleh provinsi Kepulauan Riau saja dan Pulau Sumatera saja namun secara keseluruhan yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak besar pada berbagai sektor ekonomi, termasuk industri, perdagangan, dan pariwisata. Pembatasan pergerakan, penutupan bisnis, dan gangguan rantai pasokan dapat menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

Pembangunan ekonomi di Indonesia sangat tergantung pada Pembangunan ekonomi di daerah. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek (Suliswanto, 2010). Jika pemerintah daerah mempunyai tata pemerintahan yang baik maka akan mudah mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh potensi daerah saja tetapi pengetahuan dan teknologi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena dapat menciptakan inovasi yang dapat berguna untuk mengembangkan potensi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Pemerintah daerah berhak untuk mengatur sendiri keuangan daerahnya dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Dalam pasal ini menekankan kewenangan pemerintah daerah secara luas untuk mengatur sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi Masyarakat dan kemampuan/potensi daerah atau yang disebut dengan otonomi daerah.

Sistem pemerintahan otonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu system pemerintahan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dalam wilayah atau rumah tangganya sendiri dengan tetap mempertahankan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah merupakan Upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan Keputusan terkait pengelolaan sumber daya yang dimiliki yang sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah. Dengan pemberian otonomi

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, perlu adanya system pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif untuk mengatur dana desentralisasi dengan cara yang transparan, ekonomis, efisien, dan akuntabel.

Otonomi daerah atau yang sering disebut desentralisasi fiskal menuntut kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun wilayahnya sendiri. Desentralisasi fiskal merupakan langkah pemerintah daerah untuk memberikan dampak positif apabila diimbangi dengan kapasitas fiskal yang sesuai dengan keadaan daerah otonom. Desentralisasi fiskal memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan merumuskan kebijakan yang mendukung potensi-potensi di daerah tersebut. Penerapan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan dan menyamakan tingkat kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian daerah dalam pengelolaan wilayahnya, mengurangi subsidi pemerintah, dan melaksanakan pembangunan yang merata di setiap daerah. Sejak desentralisasi fiskal diberlakukan, semua daerah di Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan dan merumuskan kebijakan agar dapat meningkatkan perkembangan daerahnya.

Desentralisasi fiskal memberikan wewenang kepada daerah dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, kebijakan fiskal dan moneter, serta agama (Suparmoko, 2002). Keberhasilan implementasi desentralisasi fiskal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan atau penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua, manajemen keuangan

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

daerah yang efisien, di mana daerah dapat menggali sumber pendapatan dan mengelola keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, keberadaan teknologi yang memadai, yang sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan atau peraturan yang dihasilkan. Keempat, manajemen yang baik dalam mengelola daerah dan menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kaho, 2001:60).

Terlaksananya desentralisasi fiskal dapat mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (Ikeji, 2011). Lin dan Liu (2000) menegaskan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal, perkembangan ekonomi suatu daerah dapat mengalami kemajuan yang lebih baik. Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Malik, N. H. (2006) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal merupakan strategi efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pose (2007) juga menyampaikan bahwa desentralisasi fiskal dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam hal pemerataan dan kesejahteraan.

Tujuan utama diberlakukannya sistem otonomi daerah/desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui program-program unggulan daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Salah satu langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghadapi otonomi daerah adalah dengan merancang strategi pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran daerah. Dalam UU No. 33 Tahun 2004, sumber penerimaan pendapatan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

fiskal melibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, pinjaman daerah, dan sumber pendapatan daerah lainnya, yang seluruhnya harus dikelola sesuai dengan ketentuan hukum. Pendapatan daerah tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan yang menjadi wewenangnya. Diharapkan bahwa pengelolaan sumber pendapatan tersebut oleh pemerintah daerah dapat mendorong perkembangan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, yang menjadi indikator kemajuan daerah dalam menjalankan prinsip otonomi daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merujuk pada sumber penerimaan yang berasal dari wilayah tersebut, yang kemudian dimanfaatkan sebagai modal dasar pemerintah daerah untuk membiayai proyek pembangunan dan kegiatan lokal, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada dana yang diterima dari pemerintah pusat. Komponen dari Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kelola kekayaan daerah yang terpisah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Brata (2004) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen terpenting dalam struktur APBD yang secara langsung mampu mendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi di Tingkat lokal dan regional. Daerah yang memiliki PAD yang tinggi dan mengalokasikan secara optimal untuk

belanja modal akan menciptakan efek multiplier yang besar dalam mendorong ekspansi kegiatan ekonomi serta peningkatan standar hidup masyarakatnya. Daerah yang mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah untuk kepentingan belanja modal seperti infrastruktur dan layanan public, secara signifikan akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kegiatan produksi dan konsumsi Masyarakat. Artinya, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh pemerintah daerah, maka laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh pemerintah daerah, maka laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut justru akan mengalami penurunan.

Gambar 1.2 Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah 10 Provinsi di Pulau Sumatera

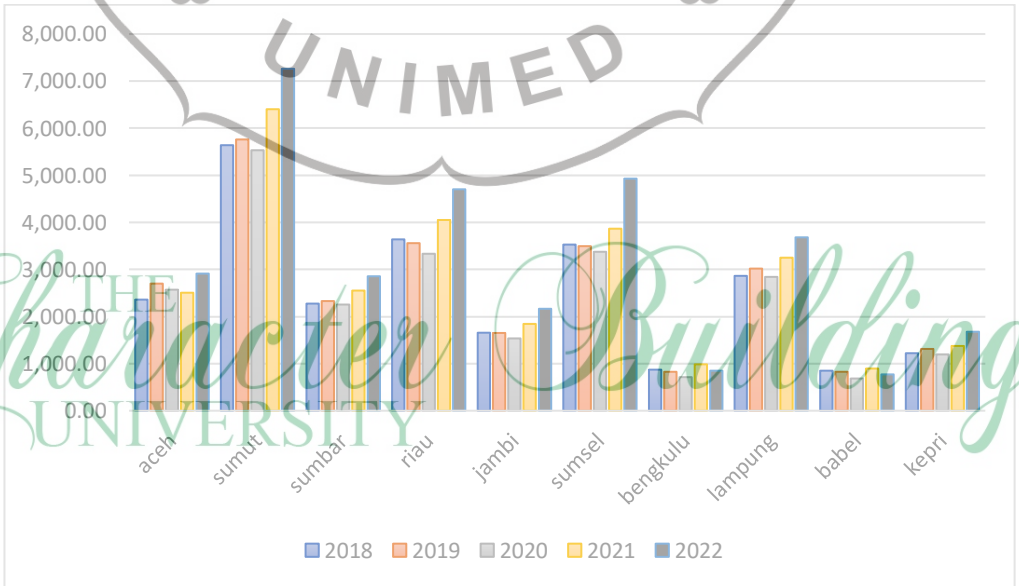

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Dari grafik 1.2 dapat dilihat bahwa perkembangan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 10 Provinsi di Pulau Sumatera selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Rata-rata Kontribusi

Pendapatan Asli Daerah 10 Provinsi di Pulau Sumatera yang terbesar terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Namun, besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah belum mampu mendukung peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara hal ini diakibatkan karena Pendapatan asli daerah di Sumatera Utara relatif kecil, hanya mencapai 20% dari total pendapatan daerah, sehingga tidak mampu mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sedangkan yang terkecil terdapat di Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2020 sebesar Rp.683,43M. Hal ini disebabkan karena Provinsi Bangka Belitung memiliki ketergantungan ekonomi yang lebih besar pada sektor pertambangan timah. Provinsi Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, dan dampaknya terhadap harga dan produksi timah dapat mempengaruhi pendapatan daerah. Menurut Lin dan Liu (2000) dalam teori federalism fiscal menyatakan bahwa dengan adanya peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka pemerintah daerah memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih baik untuk mengalokasikan dana secara optimal dan potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing. Akibatnya, alokasi anggaran daerah menjadi lebih efisien dan efektif dalam mendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi wilayah/daerahnya.

Tentunya sudah banyak penelitian terdahulu yang mengkaitkan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan ekonomi . Secara teori, Pendapatan Asli Daerah memberikan dampak positif pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil peneliti sebelumnya Ismaya (2019) dan Bima (2015). Namun ternyata hasil riset ini bertentangan dengan hasil riset peneiliti lainnya Aries (2018) dan Dewi dan Suputra (2017) menyimpulkan bahwa

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Serta hasil penelitian Afiah (2015) dan Winda Srilianti (2011) yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan adanya perbedaan hasil riset antar peneliti ini menjadi penelitian yang menarik untuk melihat lebih jauh kaitan Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Pulau Sumatera.

Selain Pendapatan Asli Daerah, faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi adalah Dana Alokasi Umum. Dalam UU No.33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum(DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Halim,2004).

Mardiasmo (2002) berpendapat bahwa dengan adanya transfer Dana Alokasi Umum dari anggaran pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana tersebut untuk membiayai sejumlah program dan kegiatan yang vital bagi daerah, seperti : Pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, serta stimulasi aktivitas perekonomian melalui investasi, subsidi, atau bantuan modal bagi pengusaha lokal. Aktivitas-aktivitas tersebut akhirnya akan berdampak pada peningkatan output daerah, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kemakmuran di Tingkat lokal. Maka dari itu, alokasi Dana Alokasi Umum yang

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

optimal memiliki peran dan potensi penting dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan Masyarakat di daerah tersebut.

Gambar 1.3 Grafik Dana Alokasi Umum 10 Provinsi di Pulau Sumatera

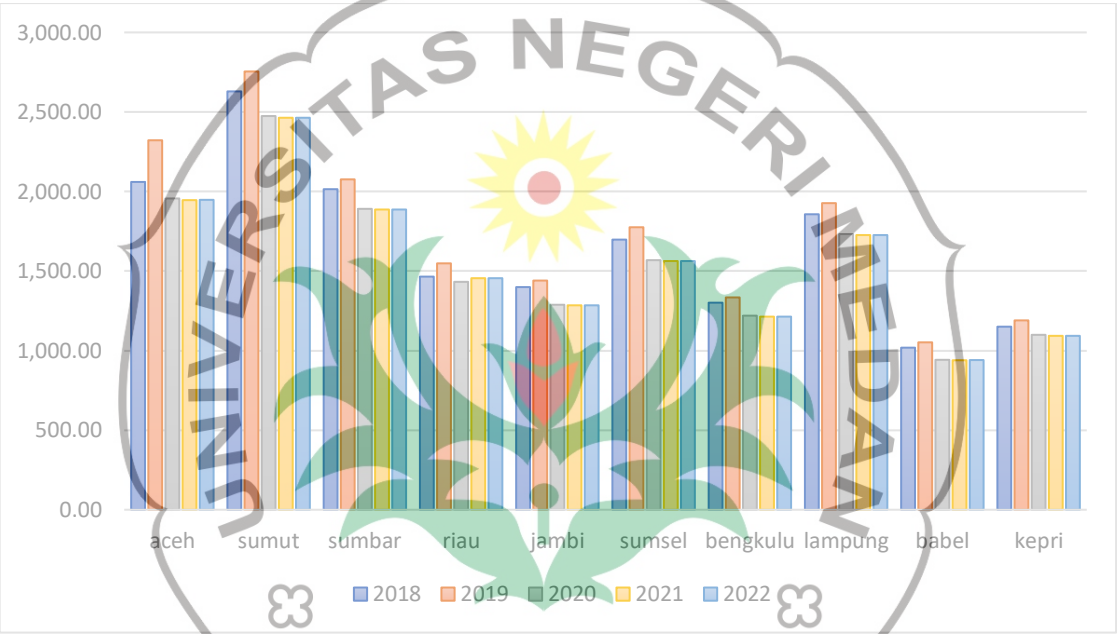

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Dari grafik 1.3 dapat dilihat bahwa pemerintah pusat memberikan dana ke daerah melalui dana alokasi umum dengan jumlah yang berbeda. Dana Alokasi Umum yang diterima setiap provinsi pada tahun 2018-2022 berbeda-beda. Dalam teori ekonomi regional yang menyatakan bahwa provinsi atau daerah yang memiliki potensi ekonomi yang besar biasanya akan mendapatkan alokasi dana yang lebih tinggi dari pemerintah pusat atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini dikarenakan provinsi dengan potensi ekonomi yang besar dianggap memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, provinsi-provinsi dengan potensi ekonomi yang besar juga dianggap memiliki kapasitas untuk mengelola dana yang lebih besar dengan lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu,

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

pemerintah pusat atau lembaga keuangan cenderung memberikan prioritas dalam alokasi dana kepada provinsi-provinsi yang memiliki potensi ekonomi yang besar. Dalam Abdullah dan Halim (2003) Teori Federalisme Fiskal menjelaskan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana Alokasi Umum sebagai transfer dana dari pusat ke daerah berperan penting dalam pemerataan fiskal dan stimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Pengalokasian Dana Alokasi Umum untuk investasi modal manusia dan teknologi di daerah sangat strategis untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang (Nugroho,2004).

Penelitian yang mengkaitkan antara Dana Alokasi Umum dengan Pendapatan Asli Daerah tentunya sudah banyak diteliti sebelumnya. Secara teori Dana Alokasi Umum berdampak positif terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya Alvaro (2022), Widyasari (2013), dan Delen (2019). Namun, hal ini bertentangan dengan hasil riset lainnya, Dewi dan Suputra (2017) dan Billah dan Wijaya (2022) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negative terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dan hasil penelitian Alfrida (2023) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pastinya kesenjangan hasil penelitian antar peneliti menjadi penelitian yang menarik untuk melihat lebih jauh kaitan antara Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi khususnya yang terjadi di Pulau Sumatera.

Selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, faktor lain yang mempengaruhi laju Pertumbuhan Ekonomi adalah Dana Alokasi Khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah tertentu. Tujuan dari alokasi dana ini adalah untuk mendukung pembiayaan kegiatan khusus yang merupakan wewenang daerah dan sejalan dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus bertujuan untuk mendukung pembiayaan kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Fokus utamanya adalah untuk membiayai kebutuhan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat yang belum memenuhi standar tertentu atau untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Kuncoro (2004) menyatakan bahwa Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Bati (2009) menyatakan bahwa peningkatan pelayanan sektor public secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana public, termasuk investasi pemerintah dan perbaikan fasilitas Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur lainnya.

Gambar 1.4 Grafik Dana Alokasi Khusus 10 Provinsi di Pulau Sumatera

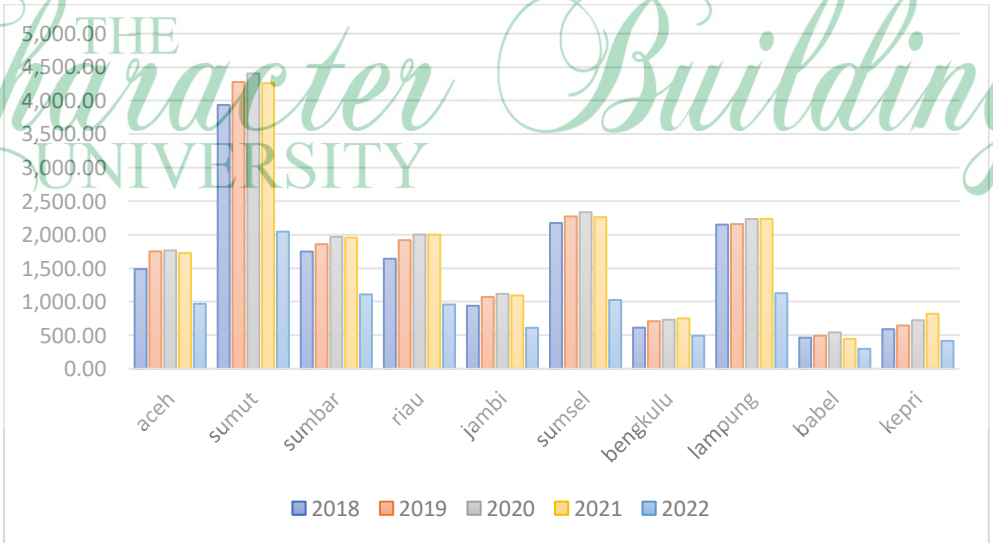

Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

Gambar 1.4 dapat dilihat bahwa pemerintah pusat memberikan dana ke daerah melalui dana alokasi khusus dengan jumlah yang berbeda. Dana Alokasi Khusus yang diterima setiap provinsi pada tahun 2018-2022 berbeda-beda. Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada setiap provinsi berbeda-beda karena Dana Alokasi Khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus dan mengatasi ketimpangan antar daerah dalam hal layanan dasar dan infrastruktur. Pemerintah pusat menetapkan prioritas-prioritas tertentu yang harus ditangani secara nasional dan mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan di berbagai provinsi. Pada tahun 2020 setiap provinsi di Pulau Sumatera memiliki Dana Alokasi Khusus yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini karena Dana Alokasi Khusus berperan sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk memfasilitasi penanganan Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat.

Tentunya sudah banyak penelitian terdahulu yang mengkaitkan antara Dana Alokasi Khusus dengan Pertumbuhan ekonomi . Secara teori, Dana Alokasi Khusus memberikan dampak positif pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil peneliti sebelumnya Alvaro (2022) dan Kumala (2018). Namun ternyata hasil riset ini bertentangan dengan hasil riset peneiliti lainnya Widyasari (2013) dan Dewi dan Suputra (2017) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Serta hasil penelitian Prasetyo dan Aida (2017) yang menyatakan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan adanya perbedaan hasil riset antar peneliti ini menjadi penelitian

yang menarik untuk melihat lebih jauh kaitan Dana Alokasi Khusus dengan Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Pulau Sumatera.

Motivasi yang mendasari penelitian ini adalah tingginya laju Pertumbuhan Ekonomi yang berasal dari penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sehingga dari fenomena tersebut peneliti ingin melihat seberapa jauh pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 10 Provinsi di Pulau Sumatera mengalami fluktuasi pada tahun 2018-2022.
2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah 10 Provinsi di Pulau Sumatera mengalami perkembangan fluktuasi pada tahun 2018-2022.
3. Alokasi Dana Alokasi Umum 10 Provinsi di Pulau Sumatera juga mengalami perkembangan yang fluktuatif.
4. Alokasi Dana Alokasi Khusus 10 Provinsi di Pulau Sumatera juga mengalami perkembangan yang fluktuatif.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, Batasan masalah diberikan agar penelitian lebih berfokus dan terarah, Batasan masalah tersebut antara lain :

1. Objek penelitian adalah 10 Provinsi di Pulau Sumatera.
2. Penelitian ini menggunakan variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi dan variabel independent dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah diungkapkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera tahun?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera tahun?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera tahun?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut :

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera tahun.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera tahun.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan untuk percepatan laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera.

2. Bagi Peneliti

Dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera.

3. Bagi Universitas

Sebagai bahan studi lebih lanjut bagi kalangan akademis yang melakukan penelitian dengan tema yang sama.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY